



ASA BERTAHAN DI TANAH ASING

NARASI PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF
STOLEN CHILDREN DI SULAWESI SELATAN

ASA BERTAHAN DI TANAH ASING

Narasi Penelitian Aksi Partisipatif Stolen Children di Sulawesi Selatan

Penyunting
Asyari Mukrim

Penulis
Asyari Mukrim, Agung Seldy Arimsyah, Aswin, Rezki Ameliyah Arief

Kontributor Foto
Kontras Sulawesi

Desain
Aden Firman

Penerbit
Kontras Sulawesi dan AJAR
Surel: office@kontrassulawesi.org

Tentang KontraS Sulawesi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sulawesi adalah organisasi masyarakat sipil yang mengusung nilai-nilai hak asasi manusia dan gerakan perdamaian guna membangun kesadaran masyarakat dan korban kekerasan untuk memperkuat proses rekonsiliasi politik serta mendorong tindakan anti-kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, melalui advokasi, kajian dan kampanye serta membangun jaringan solidaritas komunitas korban pelanggaran HAM dan masyarakat akar rumput. Untuk informasi lebih lanjut: www.kontrassulawesi.org

Tentang Asia Justice and Rights (AJAR)

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi non-profit yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya organisasi korban, dalam perjuangan melawan impunitas, dan turut mendorong terwujudnya kehidupan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar masalah pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM, pendidikan, dan penguatan komunitas di kawasan Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut: <https://asia-ajar.org>

Cetakan Pertama, Juni 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Kisah-Kisah yang Belum Selesai Setelah Konflik 24 Tahun di Timor Leste — v

Bagian 1:

Kolonialisasi dan Jalan Panjang Konflik Timor Leste — 1

Jejak Kolonialisme di Timor Leste — 1

Aneksasi Indonesia dan Kekerasan Sepanjang Konflik — 4

Pembentukan CAVR dan Temuan Fundamentalnya — 7

Bagian 2:

Konteks dan Persebaran *Stolen Children* di Sulawesi Selatan — 11

Memahami *Stolen Children* — 11

Stolen Children di Sulawesi Selatan — 16

Peta Persebaran *Stolen Children* di Sulawesi Selatan — 19

Bagian 3:

Proses dan Metode Penelitian Aksi Partisipatif — 23

Pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif — 23

Prinsip dan Metodologi Penelitian — 24

Alat Penelitian — 25

Proses Penelitian Aksi Partisipatif *Stolen Children* — 26

Bagian 4:

Temuan dan Narasi Penelitian Aksi Partisipatif *Stolen Children* — 29

Pengalaman Beragam Kekerasan — 29

Dampak Berkepanjangan bagi *Stolen Children* — 37

Sumber Kekuatan dan Siasat Bertahan Hidup — 40

Harapan *Stolen Children* — 42

Bagian 5:

Penutup dan Ringkasan Rekomendasi — 45

Merangkai Harapan, Menyusuri Jalan Pulang — 45

Daftar Pustaka — 48

Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

KATA PENGANTAR

Kisah-Kisah yang Belum Selesai Setelah Konflik 24 Tahun di Timor Leste

Kontras Sulawesi memulai sebuah perjalanan yang kelak menjadi salah satu titik krusial dan reflektif sebagai sebuah organisasi yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan ketika pada tahun 2016, Asia Justice and Rights (AJAR) berkolaborasi bersama Kontras Sulawesi untuk melakukan proses pendokumentasian korban konflik yang diambil paksa dan terpisah dari keluarganya selama konflik Timor Leste 1975-1999, atau yang dikenal dengan *Stolen Children* di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Konflik Timor Leste yang berlangsung selama 1975 hingga 1999 menyisakan banyak cerita yang belum selesai hingga hari ini. Selama 24 tahun konflik menyisakan rentetan peristiwa kejahatan yang suka atau tidak telah menjadi kerikil dalam perjalanan bangsa Indonesia yang harus diselesaikan. Sebuah upaya internasional dilakukan oleh PBB dengan membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi. Komisi ini dikenal sebagai CAVR (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste*).

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste telah menyepakati pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang pada akhir masa kerjanya secara resmi menyerahkan laporan *Per Memoriam ad Spem* kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste. Beragam mekanisme dan advokasi pada level internasional, bilateral serta

nasional telah dijalankan. Kelompok masyarakat sipil dan Komnas HAM Indonesia dan Timor-Leste telah mengambil langkah awal untuk mengimplementasikan rekomendasi KKP dalam menemukan dan mempertemukan mereka dengan keluarga.

Di sisi lain, berbagai narasi dan cerita korban yang telah didokumentasikan menarik untuk dilihat lebih jauh. Angka korban yang telah didokumentasikan akan terus bertambah meski dengan segala keterbatasan yang ada seperti faktor informasi komunikasi, jarak geografis, budaya hingga psikologi korban mewarnai proses pendokumentasian dan advokasi para *Stolen Children*. Beragam cerita dan proses pendokumentasian tersebut disatukan dalam sebuah laporan Riset Aksi Partisipatif yang kemudian dirilis dalam bentuk buku sederhana ini.

Buku *Asa Bertahan di Tanah Asing* adalah narasi dan temuan Penelitian Aksi Partisipatif Korban Konflik *Stolen Children* Timor Leste di Sulawesi Selatan. Temuan lainnya disusun dalam bentuk kumpulan narasi *Stolen Children* bertajuk *Menemui yang Terpisah*. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang dituliskan secara singkat dan sederhana untuk memberikan gambaran terkait sejarah konflik, isu *Stolen Children* dan bagaimana para penyintas menjalani hidup pasca konflik tersebut. Harapannya, narasi dan temuan *Stolen Children* yang disusun secara singkat dan sederhana ini dapat menjadi sebuah batu pijakan sekaligus kesempatan untuk memperdengarkan narasi korban sebagai kekuatan utama dari proses pengungkapan kebenaran.

Buku hasil penelitian ini diterbitkan secara kolaboratif oleh AJAR, Kontras Sulawesi dan Komunitas Labarik Lakon Sulawesi. Komunitas Labarik Lakon Sulawesi adalah komunitas korban *Stolen Children* di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang telah didokumentasikan dan menjalani reuni serta juga korban yang belum berkesempatan menjalani reuni dan bertemu keluarga mereka. Komunitas Labarik Lakon adalah upaya sederhana untuk terus mengalang solidaritas publik dan menjadi ruang saling menguatkan antar korban *Stolen Children* di Sulawesi.

Dalam mendorong pengungkapan kebenaran terhadap kisah para *Stolen Children*, maka digunakan pendekatan dalam Keadilan Transisi. Keadilan

Transisi (*Transitional Justice*) adalah sebuah pendekatan yang muncul dari perjuangan mendorong pertanggung-jawaban atas pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis baik di masa lampau maupun dewasa ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban dan para penyintasnya.

Metode yang digunakan dalam pendokumentasian korban menggunakan *Participation Action Research* (PAR) atau Riset Aksi Partisipatif yang dipandu oleh fasilitator yang bersama-sama merumuskan temuan dalam proses dan menyusunnya menjadi sebuah laporan akhir. Lokus penelitian mencakup beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yakni Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kota Palopo, Kab. Takalar, Kota Makassar, dan Kab. Gowa. Dalam catatan ini akan dijabarkan mengenai konteks *Stolen Children* serta cerita mereka selama konflik hingga mereka tinggal di Indonesia dan menjadi dewasa.

Harapan kami, buku ini dapat membantu kita belajar tentang hak asasi manusia dan menjadi celah cahaya bagi peristiwa kemanusiaan yang membutuhkan komitmen negara dalam pemenuhan hak korban konflik Timor Leste yang telah menunggu hingga hari ini. Dalam kondisi dan situasi seperti apapun, pemenuhan hak atas kebenaran, pertanggungjawaban, dan pemulihan dengan memastikan keberadaan mereka, memastikan kebersamaan anak-anak dengan orangtua dan keluarganya adalah hak asasi yang layak untuk diperjuangkan.

Akhirnya, pada buku ini, kami yakini bahwa segala bentuk upaya kecil untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan adalah cara terbaik untuk melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat. Tugas berat lainnya ialah untuk mewariskan ingatan peristiwa kemanusiaan ke masyarakat dan generasi mendatang sekaligus menjadikannya sebagai refleksi atas kerja-kerja panjang untuk membangun kesadaran masyarakat dan korban kekerasan yang lebih kuat untuk memperkuat dan mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan hak asasi manusia. ●



Pulau
Kisar

Pulau
Jaco

Selat
Wetar

Pulau
Atauro

Selat
Ombar

Dili

LAUTEM

Los Pulos

BAUCAU

Baucau

VIQUEQUE

Viqueque

MANATUTO

Manatuto

MANUFAHI

Same

AILEU

Aileu

AINARO

Ainaro

LIQUICA

Liquica

ERMERA

Gleno

BOBONARO

Maliana

COVA LIMA

Suai

Pulau
Alor

40km ke
Daerah
Kantung
Oecussi

TIMOR BARAT

Laut Timor

Daerah Kantung Oecussi

Timor-Leste

Pante
Makasar

OECUSSI

TIMOR BARAT

0 | 30km

UTARA

BAGIAN 1:

Kolonialisasi dan Jalan Panjang Konflik Timor Leste

Jejak Kolonialisme di Timor Leste

Pasca referendum pada tahun 1999, Timor Leste menjadi negara merdeka dan berdaulat yang diakui secara resmi di dunia pada tahun 2002. Terletak di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, Timor Leste menjadi sebuah negara yang masih muda dan terus menjalani dinamika dan situasi domestik dan internasionalnya. Nama resminya adalah Republik Demokratik Timor Leste dengan sistem Pemerintahan yang menganut Demokrasi Parlementer. Perjalanan Timor Leste sebagai sebuah negara koloni sejak dulu hingga menjadi negara berdaulat adalah sebuah jalan panjang yang dipenuhi dengan cerita krisis kemanusiaan.

Timor Leste pada mulanya adalah bagian dari kolonisasi bangsa-bangsa barat, bermula dari kedatangan orang Australoid dan Melanesia sejak awal abad-15. Orang Portugal mulai berdagang di Pulau Timor dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Selama era kolonial pada abad ke-17, Timor Leste adalah bagian dari Pulau Timor yang dikuasai oleh 2 kekuatan besar Eropa yaitu Portugis dan Belanda. Kedua kekuatan ini bertarung untuk menguasai pulau dan segala kekayaan alam yang dimilikinya. Persaingan tersebut tidak membuahkan hasil apa pun sehingga kedua pihak memutuskan untuk membagi pulau menjadi 2 bagian, Portugal

mengendalikan bagian timur pulau menjadi Timor dan Belanda menguasai bagian barat sebagai bagian dari wilayah jajahan di seluruh nusantara.

Di bawah pemerintahan bangsa Portugis, Timor Leste mengalami sebuah proses penjajahan dan eksploitasi hasil alam mereka terutama komoditas cendana dan kopi. Portugal berada di garis depan eksplorasi maritim, berkembang menjadi kekaisaran global pertama dari hasil perdagangan dan kolonisasi di seluruh penjuru dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Portugal memulai penanaman komoditas cendana dan kopi secara paksa sebagai tanaman penghasil uang, yang bersama dengan pemberlakuan berbagai jenis pajak membuat kekuasaan mereka meningkat atas kehidupan sehari-hari rakyat Timor. Kondisi ini semakin memburuk ketika di awal abad ke-19 ekonomi Portugal turun dan koloni-koloninya dikenakan pajak berat untuk mendukung ekonomi yang goyah saat itu (CAVR, 2010).

Pemberontakan-pemberontakan meledak sampai memasuki awal abad ke-20, ketika orang-orang Portugis memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Dom Boaventura dari Manufahi, yang mendapatkan dukungan luas dari seluruh wilayah. Kelak, peristiwa ini menjadi peristiwa penting yaitu perang Manufahi, juga dikenal Pemberontakan Besar yang berlangsung dari 1910-1912. Portugal berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui sistem pemerintahan yang menguntungkan pemimpin-pemimpin setempat tertentu dan merugikan yang lain. Hasilnya adalah suatu masyarakat yang kurang memiliki jalinan erat sebagai syarat bagi perkembangan perasaan kebangsaan akan mengalami kesulitan. Portugal mengkonsolidasikan kendali dan pengaruhnya di wilayah itu dengan *liurai* atau raja-raja kecil, mengizinkan mereka mengatur tingkat pemerintahan mandiri di daerahnya namun sekaligus memanipulasi dan memperburuk pembagian yang sudah ada di antara mereka. Konsekuensinya, perasaan identitas kebangsaan Timor menjadi sesuatu yang sulit terbentuk (Fernandes, 2008).

Portugal mati-matian menentang dekolonisasi atas koloni-koloni mereka, termasuk Timor Portugis. Hingga abad ke-20, Portugal dikendalikan oleh sistem otoriter paling lama bercokol di Eropa barat yaitu diktator Antonio de

Oliveira Salazar. Dengan slogan “republik kesatuan-korporatis”, Estado Novo alias Negara Baru Salazar memastikan semua kursi di Majelis Nasional diisi pendukung pemerintah, membungkam protes dan mogok kerja, dan melarang partai-partai politik (Fernandes, 2008).

Salazar menderita stroke dan cedera otak parah pada September 1968. Dia digantikan Marcello Caetano, yang mengenalkan istilah *primavera*, sering disebut Musim Semi Pembebasan (Fernandes, 2008). Pada 25 April 1974, upaya menolak dekolonisasi tidak dapat bertahan lagi hingga tumbangnyanya kediktatoran rezim berkat Revolusi Bunga Anyelir di Portugis. Pemerintahan Portugis yang baru terpilih secara resmi menerima prasyarat Resolusi PBB 1960 tentang Dekolonisasi, dan Timor secara resmi diakui sebagai wilayah non-otonomi di bawah pemerintahan Portugis (Robinson, 2002).

Revolusi Bunga Anyelir adalah sebuah kudeta militer di Lisbon yang berdampak negatif pada ekonomi Portugal dan struktur sosial. Kudeta ini awalnya didominasi oleh gerakan pro-demokrasi yang ingin menggantikan rezim sebelumnya, rezim dengan demokrasi liberal gaya Barat dan untuk mengembangkan dan memodernisasi ekonomi untuk mencapai standar hidup Eropa Barat, hal ini juga turut mendorong resolusi untuk mengakhiri Perang Kolonial selama 13 tahun di koloni-koloni Afrika serta negara-negara koloni lainnya di Asia termasuk di Pulau Timor.

Babak penjajahan selanjutnya terjadi selama Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil kendali dari kekuatan Eropa ketika Timor Timur diintegrasikan ke dalam Wilayah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah pemerintahan kekaisaran Jepang tahun 1942-1945. Rakyat Timor saat itu terus memberikan perlawanan dengan berbagai cara mulai melarikan diri ke atas gunung, bersekutu dengan Portugis yang menjadi sekutu pertama mereka dan melancarkan perang gerilya melawan Jepang.

Masa krusial lainnya adalah saat perang Perang Dingin. Pada 1975 setelah Revolusi Anyelir, perang di Vietnam mencapai titik akhirnya dengan kemenangan Vietnam Utara yang komunis atas Vietnam Selatan dan Amerika Serikat sebagai sekutunya. Di tengah-tengah ketakutan Amerika Serikat

dan sekutunya akan “efek domino” yang bisa mengubah lebih banyak lagi negara-negara di Asia Tenggara menjadi negara komunis, kehadiran rezim Presiden Soeharto yang sangat anti-komunis dipandang sebagai satu benteng stabilitas bagi kawasan ini untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Aneksasi Indonesia dan Kekerasan Sepanjang Konflik

Lama menjadi koloni Portugis, Timor Timur kemudian diinvasi oleh negara tetangganya, Indonesia pada tahun 1975 dan kemudian dianeksasi sebagai provinsi termuda Indonesia saat itu. Selama 24 tahun ke depan, status politik wilayah tersebut masih dalam perselisihan, baik di Timor Timur sendiri maupun secara internasional. Meskipun beberapa negara mengakui kedaulatan Indonesia, tapi terkait invasinya ke Timor Leste masih terganggu oleh status formal Portugis atas otoritas administratif.

Periode pemerintahan Indonesia (1975-1999) di Timor Timur ditandai dengan perlawanan yang pelik, baik bersenjata maupun damai. Pada tahun-tahun awal, perlawanan itu dipimpin oleh Fretilin (*Frente Revolucionária de Timor Leste Independente* - Front Revolusioner untuk Timor Timur yang Merdeka); dan sayap bersenjatanya, Falintil (*Forças Armada de Libertação Nacional de Timor Leste* - Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor Timur). Pada 1990-an, sebuah organisasi payung bernama CNRT (*Conselho Nacional de Resistência Timorese* - Dewan Nasional Perlawanan Timor) mengambil kepemimpinan, didukung oleh berbagai organisasi sosial dan politik, Front Klandestin, dan oleh Falintil.

Portugis meninggalkan Timor Timur pada Agustus 1975, dan pasukan Indonesia segera mulai menyusup ke perbatasan dari Timor Barat Indonesia. Pada tanggal 28 November, pemerintah Timor Lorosae yang terpilih takut akan invasi Indonesia yang akan segera terjadi, memproklamasikan Republik Demokratik Timor Leste.

Pada pagi hari 7 Desember 1975, Indonesia merespon dengan memulai pemboman laut di Kota Dili, diikuti dengan pendaratan pasukan terjun payung dari udara dan marinir di pantai. Pada 10 Desember, pasukan invasi

kedua merebut kota terbesar kedua, Baucau. Di tempat lain, perlawanan orang Timor terus berlanjut, tetapi hingga pada tahun 1978 aneksasi Timor Timur oleh Indonesia pada dasarnya dianggap selesai dan diklaim sebagai provinsi termuda Indonesia, provinsi ke 27.

Selama tahun-tahun awal invasi dan pendudukan Indonesia, lebih dari 100.000 orang Timor Timur meninggal sebagai dampak dari konflik. Sebagian besar yang tewas adalah warga sipil yang dibunuh oleh militer atau mati kelaparan di kamp-kamp pengasingan atau saat bersembunyi di bukit dan hutan dari militer Indonesia. Kelompok-kelompok kecil gerilyawan Timor melanjutkan perlawanan mereka selama beberapa dekade. Pada tahun 1996, Jose Ramos-Horta dan Uskup Carlos Ximenes Belo bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas upaya mereka untuk memenangkan kemerdekaan bagi Timor Timur.

Keberadaan Pemerintahan Indonesia di Timor Timur kelak ditandai oleh pola pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis oleh kekuatan angkatan bersenjata Indonesia dan oleh milisi pro-Indonesia dan kelompok paramiliter yang bertindak sebagai proksi. Terlepas dari meningkatnya kritik internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia, dan berlanjutnya perlawanan kelompok-kelompok yang menentang, pada akhirnya tetap memunculkan upaya untuk menyelesaikan tentang status politik Timor Leste secara demokratis yaitu melalui referendum (Robinson, 2003).

Perubahan situasi mulai mencuat ketika Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari kursi presiden setelah 32 tahun lamanya berkuasa di Indonesia pada Mei 1998. Pada bulan Januari 1999, Pemerintah Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk membatalkan aneksasinya atas Timor Timur jika orang-orang di wilayah itu menolak proposal untuk 'otonomi yang lebih besar'. Pada tahun 1999 inilah, Timor Timur adalah tempat terjadinya kekerasan yang mengerikan. Antara awal Januari dan akhir Oktober, setidaknya 1.200 warga sipil, dan mungkin sebanyak 1.500 terbunuh. Beberapa ditembak mati, sementara yang lain dipenggal, dicabut atau dibacok sampai mati dengan kekerasan mengerikan lainnya. Banyak yang

menjadi sasaran penyiksaan dan penganiayaan. Perempuan dan anak perempuan menderita karena kekerasan kejahatan seksual lainnya. Kekerasan sistematis akhirnya juga memicu pemindahan paksa penduduk dalam skala besar (Robinson, 2003).

Kekerasan terjadi dalam konteks upaya referendum tentang status politik Timor Timur yang diawasi dan dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 Agustus 1999. Pada periode sebelum pemungutan suara, orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan menjadi sasaran ancaman dan kekerasan oleh kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia. Terlepas dari bahaya yang nyata, warga Timor Timur pada dasarnya menyambut baik kesempatan untuk memilih masa depan politik mereka dan memberikan suara untuk kemerdekaan.

Kekerasan terburuk terjadi setelah pengumuman pemungutan suara itu pada 4 September 1999. Selama beberapa minggu, tentara dan polisi Indonesia bergabung dengan milisi bersenjata Indonesia dalam kampanye kekerasan yang begitu berkelanjutan dan brutal sehingga mengejutkan bahkan mereka yang telah memperkirakan reaksi yang muncul. Sebelum pasukan militer yang disetujui PBB tiba untuk memulihkan ketertiban pada akhir September, ratusan orang telah terbunuh dan sekitar 400.000 orang - lebih dari separuh populasi - terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Perjuangan panjang rakyat Timor Leste untuk mendapatkan kebebasan dan masa depannya pasca kolonialisasi akhirnya ditentukan pada tahun 1999. Setelah ratusan tahun kolonialisme Portugis dan 24 tahun pendudukan asing, suara mayoritas mengungkapkan keinginan untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka melalui hak atas penentuan nasib sendiri. Gelombang perlawanan dari berbagai pihak bermunculan hingga perdebatan antara memilih integrasi dan tidak semakin melebar dan menyisakan rentetan konflik peristiwa kekerasan. Pada tanggal 30 Agustus 1999, masyarakat Timor Leste melaksanakan referendum untuk menentukan nasib perjalanan bangsanya. Hasilnya ialah dominan masyarakat Timor Leste menolak otonomi khusus yang diusulkan sehingga menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Pembentukan CAVR dan Temuan Fundamentalnya

Merespon krisis kemanusiaan yang terjadi, sebuah upaya internasional dilakukan oleh PBB dengan membentuk *United Nations Transitional Administration in East Timor* atau UNTAET yang kemudian menjadi pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian di Timor Timur, sebagai hasil dari resolusi 1272 dari DK PBB pada tanggal 25 Oktober 1999. UNTAET sebagai misi PBB dalam masa transisi pemerintahan di Timor Leste memiliki mandat untuk membantu rehabilitasi dan persiapan pembangunan berkelanjutan di Timor Leste.

Salah satu program UNTAET adalah membentuk *Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste* (CAVR), sebuah komisi pencari kebenaran dan rekonsiliasi pada 13 Juli 2001 melalui Peraturan No. 2001/10 Mengenai Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Timur (*Regulation No. 2001/10 On The Establishment of A Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor*, 2001) (CAVR, 2010).

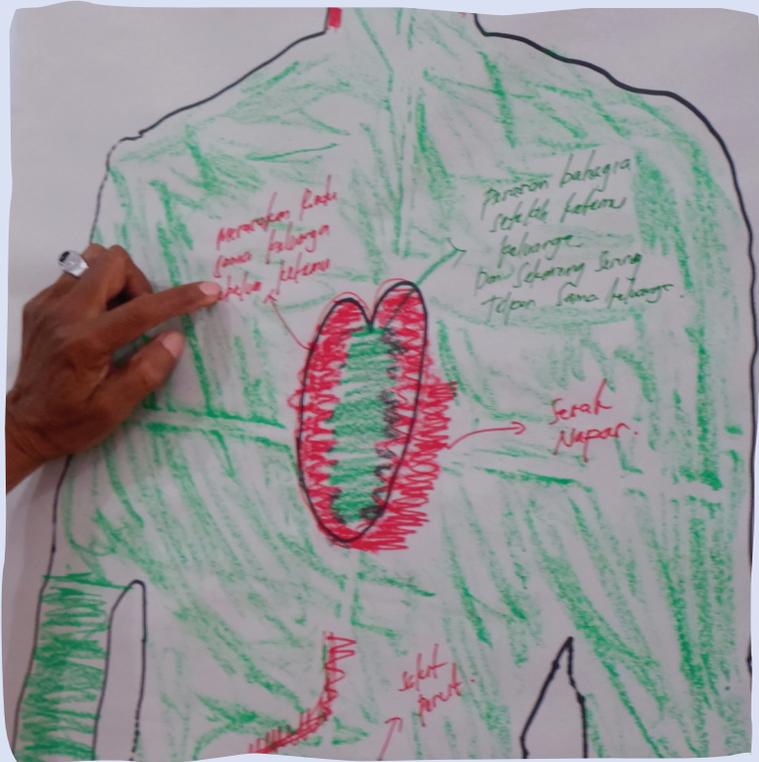
Sejak 2001, CAVR telah mengumpulkan dan menelaah lebih dari 8.000 kesaksian korban dan saksi serta lebih daripada 1.300 kesaksian mantan milisi yang mengikuti proses rekonsiliasi yang difasilitasi oleh CAVR serta mendokumentasikan bentuk-bentuk krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kurun waktu 1975-1999. Pada 31 Oktober 2005, laporan dari CAVR, yang berjudul *Chega!*, sebuah kata dalam bahasa Portugis yang berarti "tidak lagi, hentikan, cukup!" kemudian diserahkan ke masing-masing pemerintah Indonesia dan Timor Leste.

Laporan CAVR menemukan bahwa Indonesia bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi selama Timor Timur menjadi *de facto* provinsi ke-27 Indonesia. CAVR juga menemukan bahwa gerakan perlawanan di Timor Leste melakukan kejahatan perang dan pelanggaran lainnya, namun dalam skala yang jauh lebih kecil ketimbang pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia (CAVR, 2010).

Selain CAVR, dibentuk pula Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), sebuah komisi yang diprakarsai dan dibentuk secara bilateral oleh kedua pemerintah Indonesia dan Timor Leste, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) mulai bekerja pada Agustus 2005 sampai Maret 2008. Mandat KKP diantaranya mengungkap kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah Jajak Pendapat di Timor Leste 1999 dan membuat rekomendasi untuk menyembuhkan luka masa lalu dan memperkuat persahabatan berdasarkan catatan sejarah bersama. KKP meluncurkan sebuah laporan yang diberi judul *Per Memoriam Ad Spem* yang berarti “Dari Ingatan Menuju Harapan” tentang upaya pengungkapan kebenaran tentang apa yang terjadi sekitar Jajak Pendapat 1999.

Kedua temuan CAVR dan KKP ini adalah sebuah manifestasi dari memotong rantai impunitas dan budaya menyangkal (*culture of denial*) di kalangan penguasa kita atas peristiwa pelanggaran ke arah pengakuan terhadap kebenaran; mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Poin lebih diberikan kepada laporan *Chega!* atas proses yang dilaluinya selama sekian tahun mendokumentasikan peristiwa yang terjadi selama 24 tahun yang memuat cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak dibayangkan. Temuan serta rekomendasi-rekomendasinya layak untuk disebarluaskan guna menghapus impunitas dan memastikan agar pelanggaran semacam itu tidak terulang kembali di Indonesia atau di manapun. ●

Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

Bagian 2:

Konteks dan Persebaran Stolen Children di Sulawesi Selatan

Memahami Stolen Children

Salah satu bagian penting dari laporan CAVR ialah terkait pelanggaran hak terhadap anak berupa pemindahan secara paksa. Komisi CAVR yang beroperasi dari tahun 2002 hingga 2005 menyebutkan sekitar 4.534 anak telah diambil secara paksa dan dipindahkan ke berbagai wilayah di Indonesia selama periode 1975-1999, mereka adalah anak-anak di Timor-Leste mengalami segala jenis pelanggaran hak asasi manusia selama periode konflik dan pendudukan.

Penelitian Komisi CAVR juga telah mengungkapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik politik di Timor-Leste melakukan pelanggaran hingga kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, pelanggaran seksual, penahanan dan penyiksaan, pemindahan paksa, dan perekrutan paksa terhadap anak-anak. Sebagian sangat besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya (CAVR, 2010).

Praktik ini berlangsung dengan berbagai pola pemindahan baik oleh personil militer, pejabat pemerintah atau lembaga amal hingga lembaga keagamaan. Pada periode awal saat konflik mulai berlangsung, anak-anak ini, beberapa diantaranya juga sebelumnya telah direkrut oleh personil

militer dari tingkat rendah sampai menengah untuk dijadikan sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) yang bertugas untuk menunjukkan jalan, membawa barang perlengkapan hingga memenuhi kebutuhan makanan. Setelah proses penugasan selesai, beberapa diantara mereka dipisahkan secara paksa, beberapa diantara mereka diambil paksa dari orang tua mereka. Periode ini terjadi sekitar tahun 1975 hingga sekitar awal tahun 1980.

Walau pada awalnya dilakukan secara individual oleh para prajurit di medan laga, praktik pemindahan anak-anak ini kemudian terlembaga, dilakukan oleh institusi militer maupun lembaga amal dan keagamaan. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, pola pengambilan anak semakin kompleks dengan hadirnya berbagai yayasan sosial dan keagamaan yang mendapat dukungan untuk memfasilitasi pemindahan anak-anak ke Indonesia. Yayasan-yayasan yang didirikan Soeharto memiliki peran penting dalam pendanaan bagi lembaga-lembaga tersebut. Walau sebagian anak-anak yang dicuri melalui proses ini mendapat pendidikan yang cukup baik, mereka diambil tanpa izin orang tua dan tanpa upaya untuk merawat komunikasi dengan keluarga mereka (Klinken, 2014).

Periode pengambilan paksa selanjutnya terjadi seiring dengan semakin peliknya situasi konflik, Pola dan aktor pengambilan dan pemindahan semakin beragamnya. Periode ketiga ini terjadi dalam kurun tahun 1990-1998, pada periode ini, peran lembaga keagamaan dan sosial masif. Dengan alasan menawarkan pendidikan atau motif ingin menyelamatkan anak-anak tersebut dari situasi konflik, para aktor pemindahan ini membawa anak-anak Timor Leste ke Indonesia. Pada periode ini, pola-pola yang bersifat koersif dan sukarela juga masih terasa.

Periode terakhir ialah periode keempat pada 1999. Dalam konteks tahun ini, varian pemindahan anak dilakukan oleh hampir semua pihak yang disebutkan sebelumnya, yaitu, baik pemerintah, lembaga amal, lembaga keagamaan, atau juga aparat militer mengambil bagian. Perbedaan mendasar yang dapat digarisbawahi adalah konteks perpindahan pada periode 1999

menyempit dalam konteks setelah referendum. Sebagian besar pemindahan anak-anak di sini terjadi berdasarkan upaya evakuasi bagi mereka yang memilih mengungsi atau kembali ke Indonesia setelah sebelumnya mereka ke Timor Leste untuk bekerja atau berdagang.

Kekerasan sebelum dan setelah referendum tahun 1999 mengakibatkan terjadinya sebuah gelombang pengungsian ke wilayah Timor Barat, Indonesia. Dalam kegentingan yang terjadi, diperkirakan ribuan anak yang terpisah dari keluarganya. Sebagian anak-anak dipindahkan dari keluarga mereka di kamp-kamp pengungsian ke panti asuhan di Jawa dan Sulawesi. Ada juga orang tua yang akhirnya memberi izin karena menginginkan tempat yang aman dan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka, namun kemudian kontak terputus dengan anak mereka.

Kasus anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari keluarga selama konflik memiliki spektrum yang luas dan tersebar di banyak peristiwa kekerasan. Istilah "*Stolen Children*" atau "Anak-Anak yang Dicuri" digunakan untuk merujuk kepada pengambilan anak di bawah 18 tahun yang dibawa ke Indonesia oleh pejabat publik atau sepengetahuan pejabat publik pada masa konflik 1975-1999, yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga atau wali mereka. Namun begitu, dalam berbagai pemaparan laporan terkait konflik Timor Leste, istilah ini sering kali dipadankan dengan istilah "anak-anak diambil paksa" dan "dipisahkan paksa" dengan keluarga mereka.

Praktik pemindahan anak-anak adalah praktik yang disetujui dan atau dilakukan oleh pihak militer dan sipil, yang melibatkan individu dan kemudian pada institusi militer dan agama yang memfasilitasi proses ini. Praktik mengambil kendali atas anak-anak atau mengambil mereka secara paksa dari keluarga mereka, diyakini adalah bentuk pengendalian atas suatu negara. Ini adalah cara untuk menghancurkan keluarga, menghancurkan seseorang, menghancurkan masyarakat, dengan mengambil anggota keluarga mereka (AJAR, 2016). Anak-anak menjadi korban, pelaku, tenaga bantuan, dan saksi dalam konflik politik yang berkobar di Timor Leste sejak

tahun 1974. Kewajiban semua pihak untuk menempatkan kepentingan terbaik anak-anak sebagai yang utama telah secara luas diabaikan.

Prinsip hukum internasional memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang timbul dari pengakuan atas kerentanan khusus anak-anak. Tanggung jawab semua pihak untuk memenuhi kewajiban mereka melindungi anak-anak sangat mendesak, terutama dalam periode konflik, pada saat ketimpangan perimbangan kekuatan antara anak-anak dan orang dewasa sangat mencolok. CAVR menemukan bahwa semua pihak yang terlibat konflik gagal untuk memenuhi tanggung jawab mereka ini, akan tetapi bentuk pelanggaran yang paling keji dilakukan oleh Indonesia (CAVR, 2010:107).

Dalam laporan *Chegal*, Komisi CAVR menegaskan bahwa mereka yang terpisahkan sebelum tahun 1999 yang sekarang sudah dewasa menjadi tanggung jawab terhadap Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste sesudah penandatanganan “Memorandum Kesepahaman mengenai Kerja sama untuk Melindungi Hak Anak-Anak yang Terpisahkan dan Pengungsi Anak,” pada bulan Desember 2004, yang difasilitasi oleh UNHCR.

Komisi CAVR memberikan rekomendasi mengenai anak-anak yang dipisahkan dari orang tua di Timor Leste berupa; 1) Implementasi MOU antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia pada 2004 diawasi oleh NGO masing-masing negara guna memastikan bahwa hak anak yang dipisahkan, terutama bagi kasus-kasusnya yang belum terselesaikan dan bagi yang masih berada di bawah pengasuh, dilindungi—termasuk hak akses terhadap identitas dan prosedur nasional; 2) Pemerintah Timor Leste dan Indonesia memastikan untuk menjaga komunikasi bebas dan teratur antara anak dan orang tua, meskipun anak-anak berada di bawah pengasuh atau institusi pengasuhan, serta agar anak-anak dapat membuat keputusan sendiri mengenai masa depan mereka tanpa rasa takut atau intimidasi; 3) Bantuan disediakan, terutama bagi yang tinggal di area miskin dan terpencil, agar orang tua dan anak yang terpisah yang kini telah dewasa dapat melacak satu sama lain, berkomunikasi, dan bertemu (CAVR, 2010).

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Timor Leste secara bersama membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste, dengan berisikan komisioner dari kedua negara. Pada 15 Juli 2008, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) secara resmi telah menyerahkan laporan *Per Memoriam ad Spem* (Melalui Kenangan Menuju Harapan) kepada Pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang didalamnya dihasilkan beberapa rekomendasi, termasuk mencari anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka dan memastikan pemulihan korban. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan Perpres No. 72/2011 tentang rencana aksi untuk mengimplementasikan rekomendasi KKP dalam jangka waktu 5 tahun dan sepakat melaksanakan *Senior Official Meeting* (SOM) setiap tahun namun hingga kini belum juga ditemui titik terang implementasinya.

KKP memandang bahwa untuk menghormati mereka yang telah menderita atau terkena dampak pelanggaran HAM tahun 1999 dan sebelumnya, termasuk mereka yang pernah ditahan, dibunuh atau hilang, diperlukan program-program yang layak bagi keluarga-keluarga mereka. Implementasi program-program ini dapat dilakukan secara bersamaan oleh masing-masing negara (KKP, 2008).

KKP merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia dan Timor Leste bekerja sama untuk mendapatkan informasi mengenai bagi orang-orang yang hilang dan bekerja sama untuk mengumpulkan data dan memberi informasi. Komisi tersebut juga ditugaskan untuk mengidentifikasi mengenai keberadaan semua anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orang tuanya dan untuk memberi tahu keluarga mereka.

Rekomendasi lainnya ialah untuk meneruskan program-program yang sebelumnya dilakukan untuk menjamin perlindungan hak anak-anak yang dipindahkan, terutama bagi mereka yang kasus-kasusnya belum diselesaikan dan mereka yang masih berada di bawah penyeliaan orang-orang Indonesia, termasuk hak anak-anak tersebut untuk secara bebas mengakses prosedur-prosedur mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Prioritas

perlu diberikan untuk program-program pendidikan dan beasiswa untuk anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan (KKP, 2008).

Hingga kini, berdasarkan penelitian yang terus dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk oleh AJAR dan Kontras Sulawesi yang dikumpulkan, ditemukan bahwa sebagian kecil dari mereka dapat hidup dalam kondisi baik. Sementara itu, sebagian besar dari mereka menghadapi kesulitan ekonomi, hidup di rumah yang tidak layak, tidak memiliki tanah, dan tidak mendapat pekerjaan yang layak karena rendahnya tingkat pendidikan.

Hampir semua dari anak-anak tersebut masih bergulat dengan trauma yang belum terselesaikan. Sebagian besar anak diambil tanpa persetujuan dari orang tua. Janji akan mendapat pendidikan yang lebih baik tidak pernah terwujud. Banyak dari mereka yang diabaikan, baik oleh orang tua yang “mengadopsi” atau lembaga yang memelihara mereka. Sebagian lainnya tinggal bersama keluarga yang tidak mampu menyekolahkan mereka. Beberapa diantara mereka bahkan bertahan hidup sendirian di jalanan (AJAR, 2016).

Stolen Children di Sulawesi Selatan

Jalan hidup *Stolen Children* terasa berjalan kelam, setelah dipindahkan paksa ke Indonesia, keluarga yang merekrut anak-anak ini kemudian menggantikan identitas dan keyakinan anak-anak tersebut saat di Indonesia. Banyak pula diantara mereka ketika dimasukkan ke panti-panti asuhan, pesantren, dan lembaga pendidikan agama dan dijanjikan untuk sekolah gratis namun kenyataannya tidak semua berlangsung demikian. Persebaran mereka cukup beragam dan sulit dideteksi, setelah berganti identitas dan menjalani hidup bersama keluarga angkat, di pesantren atau yang hidup berpindah-pindah untuk menghindari keluarga angkat pasca mengalami kekerasan saat bersama mereka.

Salah satu daerah persebaran anak-anak Timor Leste yang diambil paksa tersebut adalah di pulau Sulawesi, terutama mereka yang diambil oleh

personil tentara berasal dari kesatuan yang ada di Sulawesi dan kemudian diikuti oleh lembaga dan yayasan yang muncul belakangan. Banyak diantara mereka yang kini telah tumbuh dewasa dan menjalani hidup baik bersama orang tua angkat mereka maupun harus bertahan hidup sendiri dengan melakoni berbagai pekerjaan. Di Sulawesi Selatan, beberapa titik persebaran juga merunut pada arus pengungsi yang terjadi selama masa konflik maupun pasca jajak pendapat referendum pada tahun 1999.

Akan tetapi, berbeda dengan para pengungsi yang datang saat menjelang maupun pasca jajak pendapat yang cenderung terkonsentrasi di berbagai titik salah satunya di Makassar dan diwadahi dalam berbagai organisasi seperti Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (Kokpit) atau kelompok transmigran di Sulawesi Selatan, para anak-anak Timor Leste yang diambil ini cenderung luput dari perhatian publik dan pemerintah.

Sejak tahun 2016, Asia Justice and Rights (AJAR) dan kelompok masyarakat sipil lainnya bekerja sama mencari anak-anak yang dicuri dari Timor Leste dan dibawa ke Indonesia selama konflik dari 1975-1999 di berbagai wilayah di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 2016, Kontras Sulawesi turut serta dalam proses pencarian di wilayah Sulawesi. Proses pencarian dan pendokumentasian *Stolen Children* tidaklah mudah, kekaburan informasi serta keberadaan mereka yang tersebar di pelosok-pelosok wilayah di berbagai kabupaten sangat membutuhkan waktu dan ketekunan yang cukup besar pula.

Proses pencarian dan pendokumentasian *Stolen Children* yang berlangsung dengan informasi yang minim dan jarak geografis yang beragam menjadi satu hambatan tersendiri. Informasi terkait keberadaan *Stolen Children* pada mulanya muncul dari berbagai pihak secara sepintas terutama korban-korban *Stolen Children* yang juga terus mencari informasi, hingga beberapa tahun setelahnya, proses pencarian dan pendokumentasian ini sudah mampu ditopang oleh jaringan komunitas hingga masyarakat umum yang membantu memberikan informasi terkait keberadaan anak-anak Timor Leste ini.

Keberadaan *Stolen Children* Timor Leste di Sulawesi dan khususnya Sulawesi Selatan bisa jadi serupa menyusuri jalan sunyi, keberadaan mereka hampir tidak diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Dalam proses pencarian dan pendokumentasian, persoalan-persoalan sering muncul karena informasi yang sangat terbatas, jarak dan lokasi pencarian yang tersebar, sulitnya melakukan verifikasi data pasca perubahan identitas. Selain itu, harus selalu menjaga kondisi psikologis mereka setelah sekian lama tidak mendengar kabar tentang tanah kelahirannya serta sanak-saudaranya.

Untuk memperoleh informasi keberadaan *Stolen Children* di wilayah Sulawesi, baik yang dibawa oleh aparat, masyarakat sipil atau yayasan keagamaan, berbagai cara dilakukan seperti intens membangun komunikasi dengan mereka yang sudah ditemukan dan meminta bantuan untuk tetap melakukan pencarian, menindaklanjuti informasi sekecil apapun atau dimanapun oleh siapapun yang mengetahui atau pernah berinteraksi dengan mereka. Cara lain yang dilakukan dalam pencarian *Stolen Children* adalah memanfaatkan keterbukaan informasi melalui bantuan teknologi media sosial seperti Facebook atau melakukan kampanye melalui media baik media cetak maupun media daring.

Hingga kini, proses pencarian terus berlangsung. Kondisi *Stolen Children* yang ditemui secara fisik, ekonomi maupun pendidikan yang sangat beragam. Dari berbagai cerita korban *Stolen Children*, tidak banyak diantara mereka yang sempat menempuh pendidikan dasar, apalagi pendidikan tinggi. Celakanya, sering kali akses pendidikan tidak adil bagi mereka. Anak laki-laki sering kali memiliki kesempatan untuk bersekolah yang lebih besar dibanding anak perempuan. Anak perempuan yang diambil paksa dan dibawa ke Indonesia melalui yayasan lebih berpeluang untuk menikmati bangku sekolah dibandingkan mereka yang dibawa oleh tentara.

Peta Persebaran *Stolen Children* di Sulawesi Selatan

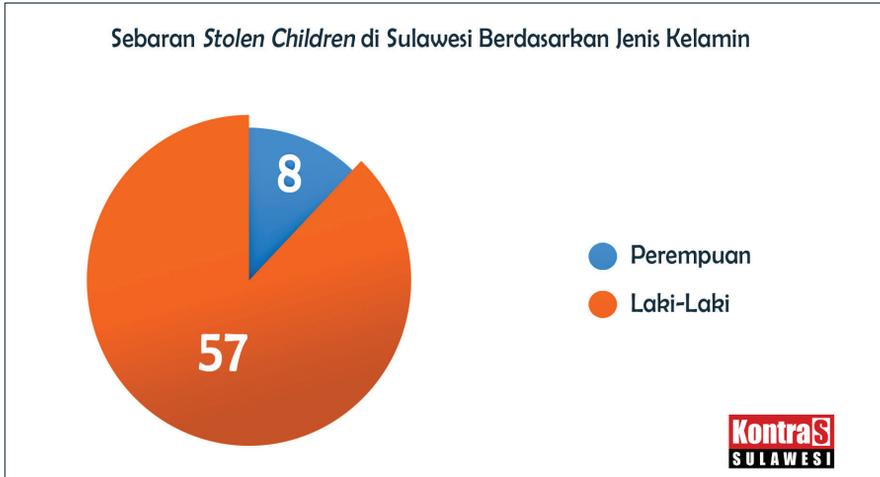
Dari 2013 hingga Juni 2020, AJAR dan KontraS Sulawesi terus melakukan pendokumentasian dan sejauh ini telah mendata 65 orang sebagai anak yang dipindahkan dari Timor Leste ke Indonesia. Mereka terdiri dari 8 perempuan dan 57 laki-laki, yang tersebar di 25 kota dan kabupaten di 5 provinsi. Proses pencarian rata-rata memakan waktu 1-3 bulan setiap tahunnya.

Tabel di bawah menunjukkan sebaran dan jumlah anak-anak yang dicuri yang berhasil didokumentasikan.



Selain persebaran wilayah di atas, isu *Stolen Children* juga dapat kita lihat dari persoalan jumlah laki-laki dan perempuan yang cukup timpang. Proses pendokumentasian *Stolen Children* perempuan adalah satu persoalan tersendiri. Tidak mudah menemukan informasi terkait keberadaan mereka karena pada beberapa kasus, hal ini dipengaruhi oleh persoalan bahwa secara personal tidak dikenali di lingkungannya masing-masing yang minim

berinteraksi dengan publik. Hal lainnya ialah dikarenakan anak-anak perempuan yang dipisahkan sebelumnya telah memiliki keluarga dan mengikut pada identitas dan budaya keluarga baru mereka, terutama suami mereka.



Secara geografis, sebaran *Stolen Children* dapat dikatakan sangat beragam dan tersebar dari berbagai daerah. Semakin masifnya upaya pencarian oleh komunitas Labarik Lakon mendorong perluasan wilayah hingga ke berbagai provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Kondisi ini menjadi konteks yang baru dalam proses pendokumentasian, jarak-jarak geografis sangat mempengaruhi pola pendokumentasian. Peta persebaran tersebut dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

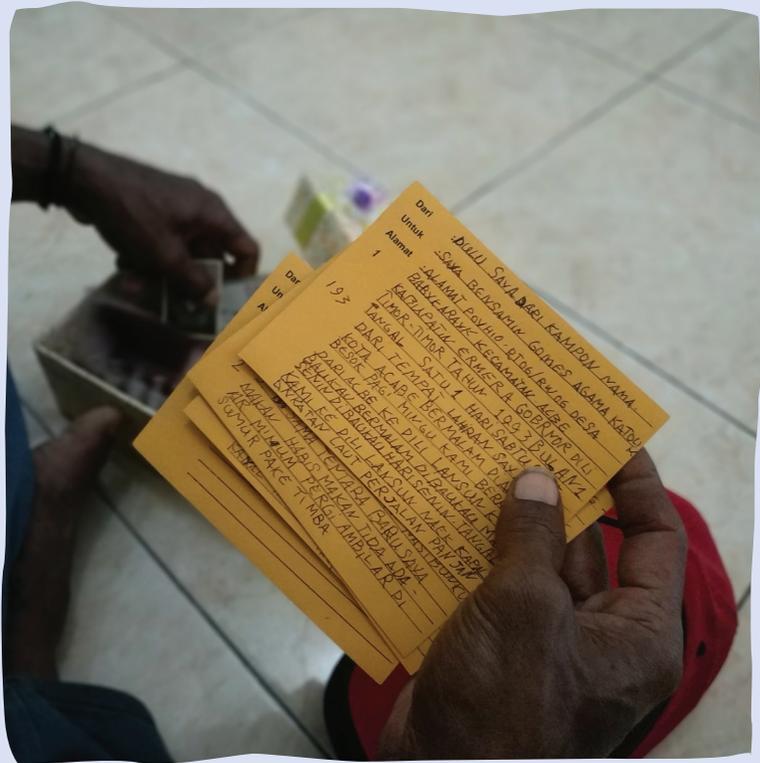
Peta persebaran ini diharapkan bisa terus meluas seiring dengan semakin banyaknya *Stolen Children* yang turut membantu pencarian dan pendokumentasian di berbagai daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh fasilitator, organisasi AJAR, dan Kontras Sulawesi. •

Gambar 1. Peta Sebaran Stolen Children di Sulawesi

Pulau Sulawesi



Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

Bagian 3:

Proses dan Metode Penelitian Aksi Partisipatif

Pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif

Penelitian ini dipandu oleh metode *Participatory Action Research* (PAR) atau Penelitian Aksi Partisipatif yang dikembangkan bersama dengan AJAR berbasis pada pengalaman penelitian sebelumnya bersama korban-korban konflik dan kekerasan di berbagai negara. Pendekatan ini berfokus pada upaya melibatkan para penyintas sebagai peneliti (partisipatif) dan secara aktif bekerja menuju hasil-hasil praktis (aksi) sekaligus berupaya menciptakan sebuah bentuk pemahaman baru (penelitian). Bagian penting dari proses ini, dan menjadi pusat tujuan proyek, adalah untuk melibatkan para penyintas dari pelanggaran terkait konflik masa lalu dan para penyintas kekerasan yang telah terjadi di Timor pasca-konflik, baik sebagai fasilitator maupun peserta.

Dalam penelitian ini, korban konflik bersama-sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapai terkait situasi dan dampak dari konflik yang mereka alami. Penelitian ini menyadari bahwa upaya pengakuan atas fakta dan peristiwa masa lalu cukup sulit diungkapkan dengan beragam hambatan baik secara personal, psikis, sosial, maupun kultural (AJAR, 2015;2017).

Dengan dipandu oleh fasilitator yang telah dilatih sebelumnya, para penyintas dan fasilitator bersama-sama menjalankan metode dengan tetap menjaga pentingnya kerahasiaan, persetujuan, keamanan, dan etika. *Informed consent* dicari dari semua peserta disampaikan sebelum mereka mulai berpartisipasi dalam proses penelitian. Para fasilitator dibekali dengan pengetahuan terkait manual penelitian aksi partisipatoris, yang bisa berlangsung selama 3-5 hari tergantung pada ketersediaan sumber daya dan waktu, fokus umum lokakarya, dan faktor-faktor lokal lainnya.

Manual penelitian dibuat dengan memperhatikan setiap agenda dari sesi perkenalan yang mencakup teknik-teknik fasilitasi dan diskusi mendalam, serta juga memperhatikan persoalan etika berkaitan dengan penelitian. Berbagai metode yang berbeda diharapkan mampu menunjukkan informasi dan menganalisis pelanggaran-pelanggaran dan kondisi-kondisi sosio-ekonomi, dan untuk menelusuri sumber-sumber kekuatan dan pemberdayaan peserta.

Prinsip dan Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dijadikan prinsip. Pertama adalah partisipasi korban yang dimaksudkan untuk mencapai aksi-aksi transformatif dengan mengedepankan keaktifan penyintas. Kedua adalah berperspektif korban dan penyintas, fasilitator yang mendokumentasikan cerita korban dan penyintas harus memiliki dasar dalam melihat kondisi objektif peserta dan hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Selain itu fasilitator, peserta dengan peserta lainnya harus memiliki kemauan dalam mendengarkan dan berbagi cerita. Yang terakhir adalah komitmen bersama yang ditanamkan oleh korban terhadap rasa empati dan upaya pengungkapan kebenaran.

Metode penelitian kemudian direncanakan melalui beberapa tahap. Secara teknis, hal tersebut dilakukan dengan langkah awal menghubungi korban via daring, penentuan wilayah persebaran, prioritas, dan *Stolen*

Children yang akan menjadi peserta. Selain itu, metode dan distribusi tanggung jawab bagi masing-masing fasilitator berguna dalam mempermudah proses penelitian.

Alat Penelitian

Proses PAR menggunakan empat metode yakni Alur Waktu, Peta Tubuh, Foto Bercerita, Kotak Memori, dan Batu Bunga. Metode ini ditentukan berdasarkan pemaparan konteks sejarah dan elaborasi cerita *Stolen Children* per periode di Alur Waktu, pengenalan titik kekerasan dan kekuatan di Peta Tubuh, cerita benda sejarah dan kenangan di metode Kotak Memori, hingga kepada metode pemulihan dan pemenuhan hak korban di Batu dan Bunga.

1. Batu dan Bunga, alat metode ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya lokal memelihara dan memperkuat impunitas. Peserta memilih batu (negatif) atau bunga (positif) untuk menggambarkan apakah hak atas kebenaran, keadilan, penyembuhan, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan telah dipenuhi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan komunitas mereka. Alasan memilih batu atau bunga kemudian dibahas sebagai kelompok.
2. Alur Waktu, alat metode ini memungkinkan penyintas untuk bekerja bersama membangun sejarah kolektif yang menyoroti kekerasan yang mereka alami sepanjang hidup mereka.
3. Peta Tubuh, alat metode ini memberi kesempatan untuk berbicara tentang dampak kekerasan pada tubuh mereka dan juga sumber dan situs kekuatan dan kebahagiaan mereka.
4. Foto Bercerita, para fasilitator mengunjungi rumah peserta untuk mendokumentasikan foto diri dan situs penting bagi mereka. Mereka menciptakan kisah foto yang mencakup lokasi dan objek dengan makna tertentu.

5. Kotak Memori, peserta diminta untuk mengisi kotak dengan benda-benda yang terhubung dengan kenangan manis atau pahit dan untuk menulis cerita tentang pengalaman hidup mereka selebar Kartu Pos. Peserta memiliki kesempatan untuk membuka kotak mereka dan menjelaskan isi kotak mereka kepada kelompok.

Proses Penelitian Aksi Partisipatif Korban Stolen Children

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap di berbagai wilayah yang terbagi di wilayah Selatan yaitu wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros. Tahap selanjutnya dilakukan di wilayah utara Sulawesi Selatan yang mencakup wilayah Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Masamba.

Fasilitator melakukan perjalanan ke wilayah korban *Stolen Children* dan mengumpulkan mereka dalam satu tempat yang aman untuk menggunakan teknik yang partisipatif. Dibagi dalam beberapa sesi alat penelitian, dan memfasilitasi para *Stolen Children* untuk terlibat dalam proses yang interaktif. ●

Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

BAGIAN 4:

Temuan dan Narasi Penelitian *Aksi Partisipatif Stolen Children*

Pengalaman Beragam Kekerasan

Kekerasan Fisik Sepanjang Konflik dan Pemisahan Paksa

Pada mulanya dan cukup dominan, para personil militer yang menginvasi Timor Leste banyak menjadikan anak laki-laki sebagai Tenaga Batuan Operasional (selanjutnya disebut TBO). Para TBO tersebut direkrut dengan cara diculik, dipaksa atau harus menyerahkan diri untuk bekerja sebagai TBO, situasi tersebut harus diterima oleh mereka sebagai cara agar mempertahankan hidup bagi mereka dan keluarga mereka selama konflik berlangsung.

Program-program TBO pada dasarnya adalah kerja perbudakan tanpa pembayaran dan tanpa hak. Banyak dari mereka yang secara terpaksa melakukan hal tersebut dan tanpa diketahui oleh orang tuanya. Pada masa konflik, anak-anak semestinya mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Hukum Perang Internasional tapi dengan terpaksa mereka memilih bergabung menjadi TBO demi memenuhi kebutuhan makan dan rasa aman yang tak dapat ditawar. Akan tetapi, rasa aman yang dibayangkan tersebut tidak ada jaminan terwujud juga. Setelah bergabung menjadi TBO, tidak sedikit diantara mereka harus mengalami berbagai bentuk peristiwa kekerasan.

Para TBO yang harus bertugas menjadi penunjuk jalan tentara saat bergelirya di hutan, mendapat tendangan ketika mulai berjalan melambat akibat kelelahan berjalan jauh. Kondisinya semakin diperparah dengan barang bawaannya berupa granat, peluru, senjata maupun obat-obatan yang bergantian dibawanya. Beberapa kisah lainnya diceritakan bahwa mereka bertugas sebagai tukang masak, mengangkut air hingga menjaga serambi, atau kisah tentang bekas luka di telapak kaki saat harus menjadi penunjuk jalan tanpa menggunakan alas kaki.

Kendala bahasa dan medan sering kali menjadi alasan tentara mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk menjadi penerjemah dan penunjuk jalan. Tak hanya anak laki-laki yang menjadi sasaran pemindahan secara paksa yang berujung pada eksploitasi dan kekerasan, anak perempuan pun tak luput dari hal demikian.

Dalam situasi konflik yang mengharuskan anak-anak TBO ini dan keluarga keluar masuk hutan demi mencari perlindungan. Kondisi kekurangan di hutan menyebabkan kelaparan dan suasana di hutan sangat mencekam, dengan bunyi pesawat dan bom yang jatuh ke darat sering didengarkan.

“Cuma ada pesawat dan kalau kami keluar dari hutan maka saya akan dibunuh katanya. Sampai di hutan ada berapa tahun itu adik sakit ada kelaparan makan tidak makan. Akhirnya adik meninggal gara-gara kelaparan.”- Maria Filomena Nunes Carvalho

Dalam proses pemindahan anak-anak asal Timor Timur ke Indonesia mereka juga mengalami kekerasan fisik. Selama perjalanan menggunakan kapal mereka mendapatkan perlakuan berupa dibenturkan ke besi kapal yang mereka tumpangi jika mereka melawan atau tidak mendengarkan perintah. Selain itu, agar anak-anak tersebut tidak diketahui bahwa mereka dibawa, mereka disembunyikan dan disekap. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak tersebut patuh untuk dibawa ke Indonesia.

Meninggalkan Tanah Kelahiran, Menuju Tanah yang Asing

Berbagai pola yang ditemukan dalam pemindahan paksa anak-anak tersebut ke Indonesia. Sebagai mana dijelaskan sebelumnya. Mereka kemudian dibawa ke Indonesia dengan janji akan disekolahkan. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit yang mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang baik. Pada tahun 1980-1990-an, pola dan aktor yang memindahkan semakin beragam, yayasan lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren juga membawa anak-anak keluar Timor Leste.

Proses pemindahan yang dilakukan dengan janji akan disekolahkan ataupun dijadikan anak angkat juga menyisakan banyak perlakuan tidak manusiawi yang di rasakan oleh anak-anak tersebut. Beberapa kesaksian korban yang dibawa oleh tentara, yayasan keagamaan memberikan gambaran pola kekerasan yang dialami saat dalam perjalanan ke Indonesia. Saat telah berada di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi tidak kunjung berujung.

Tanpa pengawasan dari orang dewasa membuat anak-anak yang dipisahkan tersebut rentan mengalami perlakuan tidak manusiawi. Selama pendokumentasian, temuan yang muncul ialah berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik anak yang dibawa oleh militer maupun oleh lembaga amal hingga lembaga keagamaan yang dialami oleh mereka setelah di Indonesia.

“Saya diberangkatkan menggunakan kapal dengan 30 anak lainnya saat itu. Walaupun terdapat larangan membawa anak ke Indonesia, namun saya tetap dibawa, jikalau ada pemeriksaan saya disuruh bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Di perjalanan menuju Indonesia bapak angkat saya sempat membenturkan kepala saya ke besi kapal karena tidak ingin berhenti menangis. Bekasnya masih ada di kening saya hingga sekarang.”

-Kaoka

Cerita pilu digambarkan bagaimana kekerasan yang anak-anak korban penculikan dan pemindahan paksa ini dialami. Dipisahkan secara paksa dari

keluarga dan tanah kelahiran membuat mereka mengalami trauma, terlebih lagi dengan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi setelah berada di Indonesia. Kondisi yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi mereka ketika pertama kali meninggalkan tanah kelahirannya.

Mengalami Eksploitasi

Anak-anak Timor Leste yang dibawa ke Indonesia rentan mendapatkan eksploitasi. Mereka yang menjadi TBO harus bekerja di luar kemampuan, misalnya harus membawa ransel berisikan senjata dan bahan makanan, serta bekerja tak kenal waktu. Hal tersebut juga terjadi ketika di Indonesia, mereka diperkerjakan oleh orang tua angkat mereka dalam kerja-kerja rumah tangga dan pekerja kasar. Mereka tidak memiliki waktu bermain, karena harus bekerja demi mendapatkan perlakuan baik dari orang tua angkat dan menyambung hidup mereka.

Ketika anak-anak lain berbahagia dengan segala permainan masa kecil. Anak-anak yang diambil paksa dari keluarganya telah mengerjakan berbagai pekerjaan orang dewasa. Anak perempuan menjadi pembantu rumah tangga yang tak dibayar. Di usia yang masih sangat belia anak-anak perempuan telah bangun subuh untuk menyiapkan sarapan, mengambil air, dan melakukan pekerjaan rumah tangga.

Disaat anak-anak lain dengan riangnya menggunakan seragam putih merah berangkat ke sekolah, anak-anak itu telah siap dengan pekerjaan yang menunggu. Ada yang menemani keluarga angkatnya bertani, ada yang sibuk dengan hewan ternaknya. Mereka masih kecil, namun menanggung pekerjaan orang dewasa. Tak ada senyum, apalagi tawa bahagia, yang ada tangis ketakutan, perut yang lapar, dan tubuh yang memar biru menahan sakit.

Kehendak Bersekolah yang Pupus

Tingkat pendidikan anak-anak yang diambil paksa sangat beragam. Tidak banyak diantara mereka dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Jika beruntung, mereka mendapatkan orang tua angkat yang bisa menyekolahkan mereka tapi tidak sedikit pula diantara mereka yang

harus mengubur mimpi mereka untuk bersekolah. Kesempatan bersekolah kemungkinan besar didapatkan oleh mereka yang dipindahkan melalui lembaga atau yayasan, banyak diantara mereka dibawa karena ajakan untuk bisa bersekolah di Indonesia meski tidak semua akhirnya berujung demikian.

Dampaknya ialah hingga kini, banyak diantara mereka akhirnya harus mengalami kesulitan karena minimnya akses terhadap pendidikan. Tidak memiliki ijazah membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ketika mereka sudah dewasa atau setelah berkeluarga.

Tercerabut dari Kebudayaanannya

Perpindahan tempat tinggal dari Timor Timur ke Indonesia memberikan pengaruh terhadap perubahan kebudayaan *Stolen Children*. Budaya-budaya asal mereka di kampung halaman hilang dan diganti dengan budaya tempat mereka tinggal, baik bahasa maupun adat istiadat.

“Apakah orang tua mengetahui keberadaan saya sekarang?” - Jose Ximenes

Sebagai contoh, urusan Bahasa sebagai salah satu penanda identitas. Begitu pentingnya, sehingga setiap bangsa memiliki bahasanya masing-masing. Begitu pun bagi orang-orang di Timor Leste. Mereka juga memiliki bahasa tersendiri. Dalam Konstitusi Timor Leste, ada dua bahasa resmi yang mereka pakai. Pertama Bahasa Tetun, dan kedua adalah Bahasa Portugis. Selain dua bahasa itu, dalam konstitusi juga mengatur tentang dua bahasa kerja. Yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Selain itu Timor Leste juga memiliki berbagai bahasa daerah, di antaranya: Bahasa Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Bahasa Wetarese.

Bagi beberapa anak yang dipisahkan dari keluarganya selama puluhan tahun ini, bahasa asli mereka sudah jarang diucapkan hingga akhirnya bahasa itu sudah mulai terlupakan. Kisah seorang anak yang dipisahkan dari keluarganya sewaktu dibawa ke Indonesia saat masih berumur 5 tahun sudah tidak ingat sama sekali bahasa ibunya. Mereka telah kehilangan satu

identitas budaya terpenting bagi mereka, yaitu bahasa. Identitas dan budaya baru yang mereka terima dari lingkungan barunya memaksa mereka untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan lingkungan barunya, alih-alih menggunakan bahasa aslinya. Sehingga, tak mudah untuk bisa mengingat dan menggunakan bahasa aslinya kembali.

Tidak adanya ruang untuk mengaktualisasikan budaya asli anak-anak Timor Leste membuat mereka semakin jauh dari identitas budayanya. Mereka juga tak punya ruang untuk dapat mengakses informasi terkait keluarga dan tanah lahirnya. Juga tidak punya ruang untuk membangun kembali komunikasi dengan keluarga dan sesama komunitasnya. Padahal, setiap orang berhak untuk mendapatkan ruang berpartisipasi dalam kebudayaan, kebudayaan apapun itu, terutama kebudayaannya sendiri.

Masih banyak kisah serupa yang menjelaskan terkait tercerabutnya identitas kebudayaan anak-anak yang dicuri ini. Seperti kisah bergantinya nama mereka, sebagian besar anak-anak Timor Leste tidak menggunakan nama asli mereka ketika tiba di Indonesia. Kebanyakan dari mereka, berganti nama mengikuti keinginan orang tua angkat mereka. Atau karena pemberian nama ketika di yayasan. Kekerasan budaya lainnya juga bisa dilihat dari diskriminasi rasial yang mereka dapatkan, tidak adanya ruang untuk mendapatkan informasi maupun akses terhadap kebudayaan mereka, pendidikan yang membuat mereka meninggalkan dan melupakan asal usulnya.

Perubahan Identitas Diri dan Hukum serta Hambatan atas Layanan Dasar

Perubahan identitas hukum yang dimaksud adalah *Stolen Children* berubah agama dan nama mereka. Perubahan tersebut mengikut kepada yayasan keagamaan yang membawa mereka, orang tua angkat, dan status pernikahan. Hal ini kemudian berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses layanan dasar. Perpindahan wilayah demi untuk bertahan hidup menyebabkan *Stolen Children* tidak memiliki kartu identitas yang sesuai dengan tempat mereka tinggal. Hal tersebut menyebabkan susah *Stolen Children* dalam mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan, karena ti-

dak adanya status yang tetap. Beberapa diantara mereka harus membuat kembali identitas baru dengan berbagai cara ketika harus mengurus berkas administrasi.

Diskriminasi dan Marginalisasi di Masyarakat

Anak-anak Timor Leste ketika tinggal di Indonesia juga mengalami diskriminasi rasial. Karena hidup di lingkungan yang sama sekali asing baginya, dan lingkungannya menganggap mereka orang asing. Perlakuan diskriminatif adalah satu cerita lain yang juga sering kali dialami oleh *Stolen Children* sewaktu berada di lingkungan baru mereka. Banyak di antara mereka sering mengalami perudungan karena perbedaan warna kulit dan ukuran tubuh. Tidak sedikit mereka mendapat siksaan dan perlakuan tidak manusiawi, karena orang yang ditempati tinggal lebih menganggapnya sebagai orang lain, ketimbang keluarganya sendiri.

Banyak para *Stolen Children* yang secara fisik dan budaya berbeda dengan masyarakat dimana mereka tinggal memberikan dampak kepada diskriminasi dan marginalisasi mereka. Salah satu hal yang paling dapat dilihat adalah tidak diperhitungkannya mereka dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat dan diskriminasi berdasarkan fisik yang berbeda. Hal ini juga terjadi pada keluarga mereka dalam ruang-ruang publik karena memilih untuk menutup diri.

Minimnya Sumber Ekonomi dan Penghidupan

“Saya lama mondar-mandir di Makassar cari kerja, bagaimana caranya bisa makan, bagaimana caranya bisa bertahan hidup” – Marsal Simenes

Sejak saat para *Stolen Children* dibawa ke Indonesia, mereka telah terpisah dengan keluarga dan materi atau harta benda yang mereka miliki. Mereka harus mencari cara agar dapat bertahan hidup hingga mendapatkan pekerjaan yang tidak menentu. Keterbatasan ekonomi membawa banyak dampak diantara pada mereka yang kondisinya harus selalu berpindah daerah dan tidak mampu membiayai kehidupan mereka sehari-hari, juga bagi keluarga dan anak mereka.

Tidak Ada Jaminan Hak Atas Keperdataan

Saat gelombang pengungsi dari Timor Leste tiba di Makassar pasca Jajak Pendapat tahun 1999, mereka ditempatkan di lokasi Jalan Racing Center. Anak-anak yang dipindahkan dari Timor Leste yang sudah menetap di Makassar dan tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian bergabung bersama para pengungsi. Beberapa *Stolen Children* yang memutuskan menjadi transmigrasi hingga saat ini belum memiliki hak atas tanah mereka. Tanah yang mereka garap masih belum mendapatkan sertifikasi sesuai yang dijanjikan. Hingga saat ini kondisi lahan garapan mereka belum menemui titik terang.

Pemerintah Indonesia menetapkan program transmigrasi bagi para pengungsi dan menyediakan wilayah Satuan Pemukiman (SP) I, yang terletak di Desa Puncak Indah dan SP II di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, serta di Desa Sejati Tobadak Delapan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Sekitar 50 Kepala Keluarga tinggal di SP I dan 150 Kepala Keluarga di SP II. Mereka diberi lahan untuk tinggal, juga lahan pekarangan dan berkebun. Akan tetapi lahan pekarangan dan lahan berkebun sampai sekarang belum jelas lokasinya.

“Kalau di pemerintah setempat saya tidak bisa bilang kalau mereka sepenuhnya tidak adil karena di sisi lain mereka menerima kami tapi disisi lain mereka tidak memberikan apa yang menjadi hak kami” - Thomas Freitas

Persoalan lebih besar dihadapi oleh mereka yang tinggal di SP II, berbeda dari SP I, karena status kepemilikan tanah belum jelas walau mereka telah bermukim di sana selama 16 tahun. Ketidakjelasan ini membuat mereka khawatir bahwa pada suatu saat tanah mereka akan diambil kembali oleh pemerintah atau diserobot oleh perusahaan perkebunan atau tambang yang saat ini sudah mulai dibuka di sekitar lokasi mereka tinggal.

Tidak Adanya Pengakuan sebagai Korban oleh Negara

“...untuk keadilan menurut saya tidak adil karena saya dipisahkan dari orang tua.”-Luis

Stolen Children tidak memiliki preferensi di antara pengungsi dan transmigran. Mereka dipandang bukan sebagai korban konflik masa lalu antara Timor Timur dengan Indonesia. Negara mengakui mereka hanya sebagai anak yang dipindahkan, padahal mereka adalah anak yang harus dipisahkan dari keluarga. Mereka adalah anak-anak yang dicuri, dan negara diharapkan memiliki pertanggungjawaban kepada mereka dan keluarganya.

Dampak Berkepanjangan Bagi Korban *Stolen Children*

Dampak Fisik dan Psikomatis

Sepanjang perjalanan menjadi TBO, proses pemindahan, dan tinggal di Indonesia, perlakuan kekerasan masih berbekas di tubuh mereka hingga kini. Kekerasan tersebut didapatkan dari yang mengambil mereka, orang tua angkat, dan yayasan. Selain itu, meski telah terjadi di masa lalu yang cukup lama, kekerasan yang mereka dapatkan seringkali terasa kembali dan membuat mereka masih merasakan kesakitan pada saat-saat tertentu

Kehidupan selama menjadi TBO membuat *Stolen Children* kerap mengalami trauma psikologis. Mereka masih dihindangi dengan perasaan ketakutan atas kekerasan dan kejadian yang mereka saksikan selama perang. Trauma psikologis kemudian berdampak kepada respon tubuh (psikosomatis). Misalnya ketika mendengarkan suara besar mereka tiba-tiba bergetar dan mengingat kembali masa ketika mereka menjadi TBO.

Hidup yang Terus Berpindah

“Selama di Sulawesi Selatan, saya sering berpindah-pindah tempat dan pekerjaan. Di Bone saya disuruh mengurus tambak oleh keluarga bapak

yang membawa saya dan hanya digaji dengan nasi yang kadang sudah tidak layak dimakan. Setelah itu saya disuruh ke keluarga bapak angkatnya di Jakarta setelah pindah agama menjadi Islam. Di Jakarta saya bekerja sebagai bujang sekolah, dijanjikan untuk sekolah nyatanya tidak. Hal tersebut dikarenakan orang tua angkat saya di Jakarta tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk membiayai sekolah.”- Ben Same Gomez Koraik

Sejak konflik Timor-Timur dengan Indonesia, mereka para *Stolen Children* telah mengalami hidup yang terus berpindah-pindah. Dari hutan ke hutan, gunung ke gunung. Begitu pula ketika mereka dipindahkan ke Indonesia, hidup mereka juga seperti itu. Perpindahan tersebut disebabkan oleh pekerjaan yang tidak tetap, keterbatasan ekonomi, dan perpisahan dengan orang tua angkat dan membuat mereka harus hidup sendiri lagi.

Pekerjaan yang Tidak Menentu dan Keterbatasan Kesejahteraan

Hidup yang terus berpindah dan keterbatasan literasi membuat *Stolen Children* tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Mereka bekerja sebagai pekerja kasar dan buruh. Banyak dari mereka bekerja di atas delapan jam sehari dan mendapatkan upah di bawah standar.

Stolen Children hidup bersama keluarga angkat dengan kondisi perekonomian yang sulit. Banyak dari mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dan mencari penghidupannya sendiri. Mereka banyak yang berpindah ke desa-desa kecil dan menjadi transmigrasi. Di sana mereka hidup seadanya dan terus mengalami keterbatasan ekonomi.

Kesulitan dalam Mengakses Layanan Kesehatan

Ketidakjelasan status kependudukan menyebabkan *Stolen Children* kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Di beberapa daerah, mereka tidak mendapatkan jaminan berupa Kartu BPJS atau KIS yang menghambat mereka dalam berobat ketika sakit. Mereka bertahan dengan sakitnya dan memiliki berobat secara tradisional.

Perasaan Terkucilkan dalam Lingkungan Sendiri

Keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, dan budaya yang berbeda menyebabkan *Stolen Children* termarginalisasi. Mereka memiliki kecemasan dalam mengungkapkan cerita mereka kepada lingkungan sosialnya dan memilih untuk diam saja. Adapun dalam masyarakat suara mereka kurang dipertimbangkan. Hal tersebut menyebabkan *Stolen Children* memiliki jarak dengan tetangganya dan mengalami kesendirian.

Selain itu, Perasaan rendah terkucilkan juga sering muncul dari *Stolen Children* disebabkan karena mereka tidak memiliki keluarga di Indonesia dan situasi mereka pada saat menjadi TBO. Mereka kurang mampu mengungkapkan pendapat dalam masyarakat dan tidak percaya diri. Mereka rentan mendapatkan kekerasan yang baru dalam masyarakat yakni diskriminasi sosial.

Mengadopsi Sikap Kekerasan Sebagai Cara untuk Bertahan Hidup atau dari Ancaman.

Temuan lain yang juga penting ialah bahwa beberapa *Stolen Children* yang menjadi TBO rentan mengadopsi watak keras yang mereka alami semasa konflik. Mereka menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menghadapi situasi buruk selama di Indonesia. Mereka melawan kekerasan dengan kekerasan. Perasaan ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba, beragam situasi dan konteks turut melatarbelakangi situasi tersebut dan meski secara perlahan telah berubah tapi beberapa diantara mereka cukup kesulitan untuk melepaskan perasaan tersebut.

Dampak Antar Generasi dan Kesenjangan Warisan Ingatan kepada Keluarga dan Masyarakat

Peristiwa masa lalu yang dialami oleh *Stolen Children* sejak masa konflik hingga berada di Indonesia juga memberikan dampak jangka panjang. Dampak tersebut bukan hanya pada diri mereka tetapi juga keluarga. Rasa enggan untuk menceritakan pengalaman masa lalu mengakibatkan terputusnya cerita antara mereka dengan keluarganya. Hal tersebut disebabkan karena kekhawatiran mereka dalam menceritakan apa yang menjadi luka.

Di satu sisi mereka yang menceritakan dapat mendapatkan dukungan dan penerimaan dari keluarga yang bisa menjadi kekuatan tersendiri sebagai korban. Namun di sisi yang lain, keengganan bercerita ataupun penolakan dari keluarga memiliki potensi dalam terputusnya cerita. *Stolen Children* akan menyimpan ceritanya dalam diri, hingga keluarga tidak memiliki peran dalam mendukung pemenuhan hak korban.

Selain itu, konflik tersebut menyebabkan beragam kesulitan bagi korban, hal tersebut akhirnya juga berdampak pada keluarga *Stolen Children*. Mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya mengharuskan anak mereka juga bekerja walaupun masih di bawah umur. Selain itu banyak dari mereka terpaksa tidak melanjutkan pendidikan mereka. Dampak lainnya adalah diskriminasi *Stolen Children* dan keluarga oleh lingkungan sosialnya.

Perspektif korban dan kepekaan sosial adalah hal yang jarang didapatkan oleh masyarakat, sejarah yang dikonsumsi tidak memberikan referensi itu. Akibatnya, *Stolen Children* yang memiliki fisik dan pengalaman konflik berbeda akan dilihat berbeda pula. Mereka tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat, perundungan, dan marginalisasi, terlebih jika mereka juga memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini secara struktural tidak memberikan preferensi yang berbeda bagi *Stolen Children* sebagai korban dan penyintas konflik. Banyak di antara mereka tidak masuk dan mendapat jaminan kesehatan, keluarga mereka tidak mendapatkan beasiswa untuk bersekolah. Dampak ini jika tak segera diputus akan memperpanjang rantai impunitas.

Sumber-Sumber Kekuatan dan Siasat Bertahan Hidup

Reuni dan Bertemu Keluarga

"Saya paling rindu sama adik saya di kampung, saya sayang sama dia."
Jose Ximenes

Bagi *Stolen Children*, proses ditemukan dan terdokumentasikan adalah satu tahap yang mungkin terasa aneh. Ada saat ketika seseorang yang asing bertemu dengan mereka dan menanyakan informasi terkait identitas mereka, menceritakan tentang proses pendokumentasian anak-anak yang terpisahkan dari orang tua dan keluarga mereka. Beberapa merasa terkejut tapi tidak sedikit juga yang berusaha untuk melupakan apa yang terjadi.

Setelah didata dan dihubungkan dengan keluarga mereka dan mendapatkan kesempatan untuk ke Timor Leste dan bertemu secara langsung dengan keluarganya membuat *Stolen Children* ini berada dalam satu situasi yang tidak terbayangkan. Haru dan perasaan yang bercampur ketika bertemu dengan keluarga mereka yang telah terpisah sejak dari 30 tahun hingga 40 tahun lebih lamanya tidak bertemu memunculkan satu perasaan dan menjadi sumber kekuatan baru dalam hidup mereka.

“Saya ketemu dengan saudara yang masih katolik, mereka gembira sekali, sampai teriak-teriak ketemu dengan saya, orang tua sudah meninggal, saya tidak lihat, jadi saya tinggal lihat kuburannya, saya di situ menangis, dari kecil saya tinggalkan kampung, saya tidak pernah liat orang tua, setelah meninggal saya baru bisa ke sini, tetapi saya bersyukur bisa lihat kampung.” - Manulai Manukodi

Di semua pengalaman dan hal-hal yang terjadi selama di Indonesia dan dampaknya kepada *Stolen Children*, mereka tetap memiliki semangat bertahan walau cerita pedih mereka di masa lalu masih terus membayangi. Bagi yang belum berkesempatan bertemu keluarga karena masih dalam proses pencarian, setiap waktu dihabiskan serupa sedang menunggu kabar baik. Menunggu kabar baik terkait keluarganya, apakah masih hidup atau sudah meninggal atau perasaan khawatir dan gugup ketika akan kembali dan membayangkan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan kehidupan mereka selama di Indonesia adalah satu momen penting bagi *Stolen Children* untuk memulai sebuah proses pemulihannya sendiri.

Dukungan Keluarga dan Lingkungan Saat Ini

Perasaan terkejut atas hadirnya informasi soal keberadaan keluarga di Timor Leste tidak hanya mengejutkan *Stolen Children* itu sendiri tapi juga kepada keluarga mereka di Indonesia saat ini. *Stolen Children* yang telah berkeluarga atau masih bersama keluarga angkat akan mendiskusikan berita ini, pada titik ini dukungan dan motivasi dari keluarga mereka menjadi sangat penting. Izin mereka dan segala perasaan bercampur di benak keluarga mereka akan menjadi hal yang dipertimbangkan oleh *Stolen Children* untuk memutuskan bertemu keluarga mereka atau tidak. Kekuatan mereka terbentuk melalui dukungan keluarga, sanak saudara mereka yang telah menemaninya tumbuh dewasa.

Selain dari keluarga, dukungan dari lingkungan mereka tinggal dan bekerja menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi korban untuk tetap bertahan hidup. Dukungan tersebut bisa saja berupa kesempatan bersosialisasi, pembukaan lapangan pekerjaan bagi mereka ataupun pelibatan dalam kerja-kerja dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Atau dukungan teman-teman mereka yang memberi informasi terkait dan mendengarkan cerita tentang kisah lalu mereka di Timor Leste adalah satu hal yang sangat disyukuri oleh *Stolen Children*.

Komunitas Labarik Lakon

Beberapa tahun belakangan, meski saling berjarak dan memiliki kesibukan masing-masing, pola interaksi dan komunitas antar *Stolen Children* juga semakin meluas membuat mereka dapat saling mengunjungi atau sekadar berbagi kabar melalui gawai mereka. Hal ini diyakini sebagai sebuah proses pemulihan bagi mereka dan harapannya dapat berdampak positif bagi kehidupan mereka selanjutnya.

Harapan *Stolen Children*

Di antara dampak konflik dan hak-hak mereka yang belum dipenuhi, mereka tetap berjuang dan menanam harapan. Secara umum harapan *Stolen Children* adalah agar cerita mereka tersampaikan kepada publik, juga

kepada pemerintah baik itu kedua belah pihak pemerintah Indonesia dan Timor Leste hingga pemerintah daerah tempat mereka tinggal saat ini. Hal ini menjadi penting sebagai sebuah upaya pengungkapan kebenaran yang mendapat dukungan dari masyarakat umum. Kita sudah selayaknya turut memberikan perhatian terhadap isu-isu pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di sekitar kita, termasuk isu *Stolen Children*.

Selain itu, bagi mereka yang ditempatkan di daerah transmigrasi mengharapkan adanya kejelasan bagi lahan mereka. Harapan lainnya adalah agar bisa mendapatkan kesempatan peningkatan kesejahteraan dan mendapatkan jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarga, serta keberlanjutan dari komunitas Labarik Lakon.

“Semoga kedepannya teman-teman yang belum ditemukan, cepat ditemukan, dan kita lebih banyak lagi kumpul sama-sama Labarik Lakon.” - Zuhuse Peimau

Memiliki keluarga baru komunitas Labarik Lakon bersama teman-teman Timor lainnya yang berada di Sulawesi adalah kesenangan baru bagi mereka. Kebenaran akan cerita hidup mereka akan terus menyimpan segudang cerita yang belum tersampaikan ke keluarga di Timor. •

Asa Bertahan di Tanah Asing



Narasi Penelitian Aksi Partisipatif
Stolen Children di Sulawesi

Bagian 5:

Penutup dan Ringkasan Rekomendasi

Merangkai Harapan, Menyusuri Jalan Pulang

Konflik selalu menyisakan luka yang dalam bagi semua orang yang mengalaminya, tidak ada orang yang menginginkan konflik dan kekerasan, apalagi mengulangi kekerasan akibat konflik tersebut. Ribuan anak Timor Leste tak memiliki kesempatan bermain seperti anak-anak pada umumnya. Pada usia yang masih butuh kasih sayang orang tua mereka telah terenggut dari akar budayanya, dari orang tua, dan keluarga yang membesarkannya, dari tanah yang mereka cintai. Terpisah ribuan kilometer dari keluarga pada usia yang masih sangat dini. Kisah ini tidak hanya tentang melankolia kesedihan tetapi juga tentang jejak peristiwa kemanusiaan yang harus kita pelajari, menjadi pengingat untuk tidak lagi terulang kelak.

Penelitian Aksi Partisipatif ini telah memberikan pesan yang kuat kepada fasilitator dan publik tentang dampak jangka panjang dan antar generasi dari kekerasan yang terjadi selama konflik Timor Leste 1975-1999. Hasilnya mungkin masih banyak yang belum tersampaikan, masih banyak narasi yang sebenarnya masih terendap dalam ingatan yang paling dalam bagi *Stolen Children* yang entah bisa atau tidak terungkap kan tapi ini sudah

cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kita melewati sebuah perjalanan bangsa yang cukup kelam.

Dibutuhkan langkah dan upaya lebih kuat lagi bagi semua pihak, baik itu oleh kedua negara; Pemerintahan Indonesia dan Timor Leste, masyarakat sipil dan komunitas korban untuk bisa bersama-sama beranjak dari masa lalu dan mulai menjalani kehidupan yang lebih layak. Konsekuensi dari temuan penelitian ini semakin menguatkan bahwa perlunya program dan respon kebijakan yang menyeluruh untuk segera menjalankan rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan sebelumnya oleh CAVR dan KPP terutama terkait proses pertemuan *Stolen Children* dengan keluarga mereka, menangani trauma, efek psikologis dan dampak sosial-ekonomi yang terjadi selama konflik, dan kekerasan yang masih terjadi hingga hari ini.

Kedua negara perlu memastikan akses korban terhadap keadilan, membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka selama dan setelah konflik, mengenali kekerasan yang mereka alami dan dampaknya dan memastikan hak atas jaminan peristiwa serupa tidak berulang. Perlu komitmen yang kuat oleh negara untuk menunjukkan upaya serius memotong rantai impunitas yang masih langgeng hingga hari ini.

Pendekatan penelitian ini berusaha memberi kesempatan belajar kepada kita semua untuk belajar dari masa lalu dan terus mencari celah untuk melihat ke masa depan dan berusaha mempromosikan perubahan dalam struktur dan kondisi yang lebih layak bagi korban dan komunitas korban, terutama *Stolen Children* di Indonesia. Harapan mereka untuk bisa bertemu keluarga mereka, menyusuri jalan pulang di kampung mereka yang sempat mereka tinggalkan bisa segera terwujud bagi mereka yang belum bertemu keluarganya. Dan jaminan atas pemulihan atas situasi dan dampak sosial ekonomi bagi mereka yang telah bertemu keluarganya.

Pada akhirnya, penelitian ini sangat berhutang budi kepada para *Stolen Children* yang kami pinjam ceritanya dan telah berpartisipasi dalam penelitian aksi ini. Mereka telah memberikan waktu berharga untuk saling belajar

mendengarkan satu sama lain dan saling mendukung. Kami berharap bahwa pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Indonesia meningkatkan perhatiannya dengan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk membantu memberdayakan mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil peran penting untuk menemukan jalan kebenaran dan keadilan, selayak dan sebaik-baiknya. ●

DAFTAR PUSTAKA

- Asia Justice and Rights (AJAR). 2013. *Remembering My Beloved, Remembering My Pain: Victims of Atrocities Collect Photographs And Stories To Push For Change*. Jakarta: AJAR
- ACbit dan AJAR, 2017, *Our Path is Upwards; Becoming Strong Together: Strengthening Women Survivors of Violence in Timor-Leste Through Participatory Action Research (PAR)*, Asosiasaun Chega! ba ita (ACbit) Asia Justice and Rights (AJAR) In Cooperation with UN Women Asia-Pacific and UN Trust Fund to End Violence Against Women
- Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste (CAVR), 2010, *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Durand, Frédéric, 2011, *Three centuries of violence and struggle in East Timor (1726-2008)*, Online Encyclopedia of Mass Violence, [online], published on: 14 October, 2011, Diakses 27/04/2020, <http://bo-k2s.sciences-po.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/three-centuries-violence-and-struggle-east-timor-1726-2008>, ISSN 1961-9898
- Fernandes, Clinton, 2008, *East Timor: Colonialism, Independence and Beyond*, in *Hotspot Histories: Asia and Oceania*, edn. First, Greenwood Press, Connecticut, USA, pp. 25 – 49
- Hernawan, Budi dan Pat Wlash, 2015, *Inconvenient Truths: The Fate of the Chega! And Per Memoriam Ad Spem Reports on Timor-Leste*; Jakarta, Bisa diakses pada: <http://asia-ajar.org/2015/09/inconvenient-truth-the-fate-of-the-chega-and-per-memoriam-ad-spem-reports-on-timor-leste/>
- Klinken, Helene van, 2014, *Anak-anak Tim-Tim di Indonesia: Sebuah Cermin Masa Kelam*, Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), 2008, *Per Memoriam Ad Spem*, dapat diakses pada <http://www.chegareport.net/wp-content/uploads/2014/10/CTF-laporan-akhir-20081.pdf>
- Mukrim, Asyari, dkk, 2017, *Nahebiti: Menyelami Kisah, Menanam Harapan*, Jakarta: Kontras Sulawesi dan AJAR

- Robinson, Geoffrey. 2003. *East Timor 1999 Crimes against Humanity: A Report Commissioned By The United Nations Office of The High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, dapat diakses pada <https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/12-Annexe1-East-Timor-1999-GeoffreyRobinson.pdf>
- Robinson, Geoffrey. 2006. *East Timor 1999: Crimes against Humanity. (A Report commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights)*. Jakarta & Dili; HAK Association & ELSAM
- Robinson, Geoffrey. 2011. *East Timor Ten Years On: Legacies of Violence*. *The Journal of Asian Studies*, 70(4), 1007-1021. Retrieved July 11, 2020, from www.jstor.org/stable/41349980
- Wandita, Galuh dan Isabelinha Pinto. 2016. *Stolen: Perjalanan Pulang Anak Timor Yang Dibawa Paksa Ke Indonesia Dalam Potret Dan Kenangan*. Jakarta: AJAR
- Wandita, Galuh dan Karen Campbell-Nelson, 2015, *Melepas Belunggu Impunitas; Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi Bagi Perempuan Penyintas*, Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR) bekerjasama dengan Komnas Perempuan.
- Yolanda, Selviana, dkk, 2016, *Meniti Jalan Pulang: Membawa Anak-anak Timor-Leste yang Dicuri dan Dibawa ke Indonesia untuk Bertemu Kembali dengan Keluarga Mereka*, (Kertas Posisi) Jakarta: AJAR, KontraS, IKOHI, HAK Association, ACBIT, Asosiasi Nasional Korban Timor-Leste.



KontraS
SULAWESI

 **AJAR**
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

LABARIK
LAKON